



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**



**RUDOLF IKRAR PUTRA07  
07 153 101**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : **RUDOLF IKRAR PUTRA**  
No. BP : 07 153 101  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : **Hubungan antara Dana Alokasi Umum,  
Belanja Modal, dan Kualitas Pembangunan  
Manusia di Sumatera Barat**

Telah disajikan dan disetujui melalui ujian seminar akhir yang diadakan sesuai porsedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Desember 2011  
Pembimbing




Firdaus, SE, M.Si, Ak  
NIP. 197507272001121004

**Mengetahui :**

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA  
NIP. 195410091980121001



Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak  
NIP. 1960091119860310001



	No. Alumni Universitas	RUDOLF IKRAR PUTRA	No. Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b>		

a). Tempat /Tgl Lahir : Padang / 28 Oktober 1989 b). Nama Orang Tua : Refrizal dan Nur Irdawati c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 07153101 f). Tanggal Lulus : 16 Januari 2012 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,12 i). Lama Studi : 4 Tahun 3 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Bengkuang No. 36 Purus Baru Padang

**HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, DAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA BARAT**

Skripsi S-1 Oleh: Rudolf Ikrar Putra, Pembimbing : Firdaus, SE, M.Si, Akt

**ABSTRAK**

The objective of the research is to recognize the effects of the General Allocation Fund towards the Capital Expenditures and the Quality of Human Development (which is measured by Human Development Index HDI). The sample of the research is 19 regencies/ municipalities in West Sumatera. The data used is the secondary data of the Regional Revenues and Expenditures Budget of regional government of regencies/ municipalities in West Sumatera, which includes Regional Expenditures Actual Report, General Allocation Fund (DAU) and Human Development Index (HDI) in the fiscal years of 2007-2009.

The result of the research shows that the General Allocation Fund has positive effects on the Capital Expenditures. This means that the Regional Government is highly dependant on the disbursement of funds from the central government, especially the General Allocation Fund for their expenditures, in particular their capital expenditures. These expenditures are beneficial towards the Human Development Index, which means that the

Regional Capital Expenditures Allocation more greatly supports the development of the regional welfare.

**Keywords:** *General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditures, Human Development Index (HDI)*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT karena telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga Penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi.

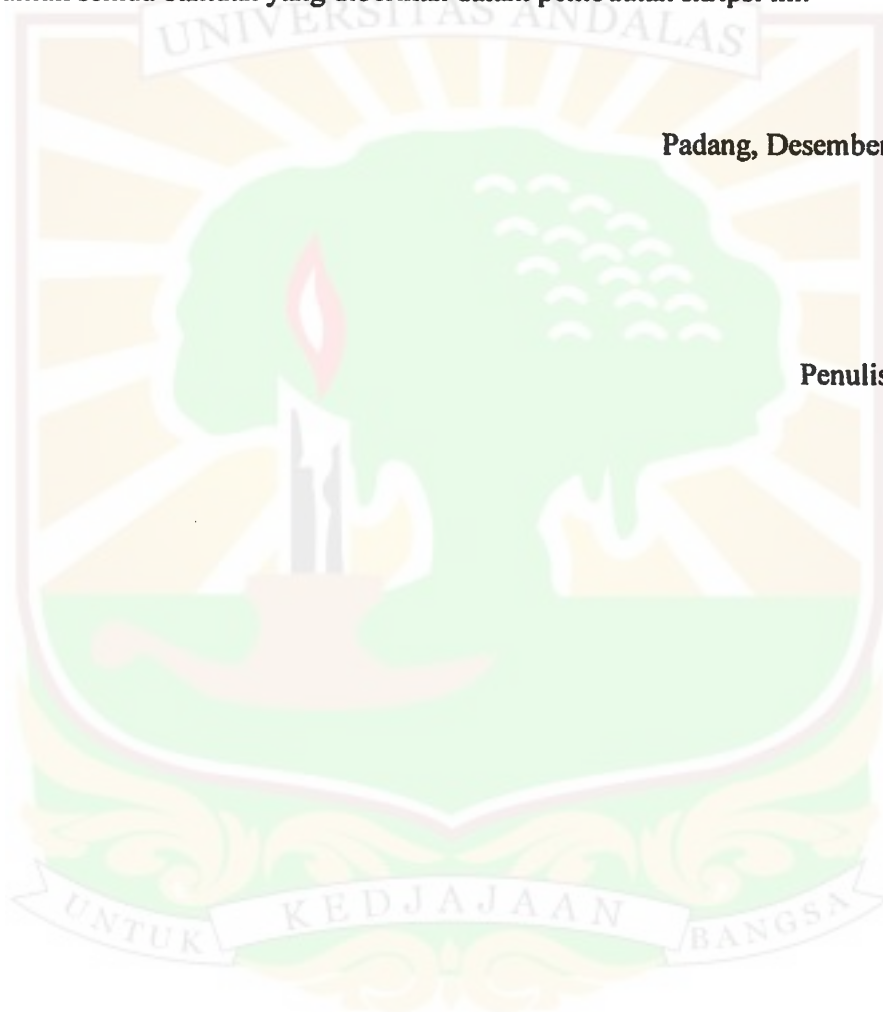
Ucapan terimakasih tidak lupa Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Firdaus M. Si, Ak selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal penulisan skripsi sampai Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak dan Bapak Efa Yonnedi SE, MMPM, Phd, Ak, selaku penelaah dalam seminar skripsi Penulis.
5. Ibu Dra. Husna Roza, M.Com (Hons) , Ak, selaku pembimbing akademik Penulis.
6. Kepada kedua Orang Tua saya, Nur Irdawati dan Refrizal. Thanks for everything. You are my inspiration. I love you all...
7. Semua dosen dan asisten dosen yang telah mengajar dan mendidik Penulis di jurusan akuntansi.
8. Semua petugas di biro akuntansi atas bantuan yang diberikan kepada Penulis selama ini.

9. Teman-teman seperjuangan 07 yang tidak bisa saya tulis semuanya.
10. Senior dan junior 04,05,06,09,10,11 makasi atas doanya.
11. Staf ARR, makasi atas bantuannya
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk semua bantuan yang diberikan dalam pembuatan skripsi ini.

Padang, Desember 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Batasan Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Konsep Desentralisasi .....	7
2.2 Konsep Otonomi Daerah .....	8
2.2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Daerah .....	9
2.2.2 Asas Otonomi Daerah .....	11
2.2.3 Ruang Lingkup Otonomi Daerah .....	12
2.3 Dana Alokasi Umum .....	18
2.3.1 Variabel DAU .....	18
2.3.2 Formulasi DAU dalam Kerangka UU No 33 tahun 2004 .....	19
2.3.3 Bentuk Umum Formula DAU .....	20
2.4 Belanja Modal .....	21
2.5 Indeks Pembangunan Manusia .....	22
2.5.1. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia .....	23
2.6. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	25

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Desain Penelitian .....	28
3.2 Sampel dan Populasi Penelitian .....	28
3.3 Definisi Variabel dan Pengukurannya .....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Metode Analisis Data.....	30

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Data.....	33
4.2 Deskriptif Statistik Penelitian .....	36
4.3 Uji Normalitas.....	38
4.4 Analisa Regresi Sederhana .....	39
4.5 Pembahasan Hasil .....	
4.5.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal .....	41
4.5.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	42

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	44
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	45
5.3 Saran .....	45

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal di Sumatera Barat tahun 2007
- Lampiran 2 Daftar Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal di Sumatera Barat tahun 2008
- Lampiran 3 Daftar Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal di Sumatera Barat tahun 2009
- Lampiran 4 Indeks Pembangunan Manusia tahun 2007-2009 di Sumatera Barat
- Lampiran 5 Hasil uji statistik
- Lampiran 6 Persentase Belanja Modal terhadap Dana Alokasi Umum
- Lampiran 7 Daftar Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Terbitnya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menandai era baru dalam tata kelola pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Melalui otonomi daerah ini, pembangunan nasional menjadi bersifat inklusif sehingga mengedepankan pembangunan yang berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusatnya (Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, 2011). Kebijakan ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara pembangunan di pusat dan daerah sesuai dengan UUD 1945 yang mengamankan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian untuk pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik, dilakukanlah amandemen terhadap UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digantikan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan amandemen ini diharapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah akan lebih berfokus kepada kesejahteraan rakyat.

Kebijakan desentralisasi tersebut kemudian lebih difokuskan kepada kemandirian daerah., dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terwujud saat pemerintah daerah diberikan wewenang dalam menentukan sendiri

alokasi belanja yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, ini berarti daerah diharapkan mampu mengelola sendiri pendapatan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperbaiki pengelolaan pendapatan yang berasal dari berbagai jenis pajak dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Salah satu instrumen lain dari otonomi daerah adalah adanya transfer ke daerah oleh pemerintah pusat untuk mendukung segala kegiatan di daerah yang sesuai dengan prinsip *money follow function*. Namun tidak semua daerah mampu mengelola pendapatannya dengan baik karena adanya tingkat kebutuhan yang berbeda. Adanya pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatannya yang berasal dari pajak dan bukan pajak lebih besar atau lebih kecil mengakibatkan diselenggakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar pemerintahan (Suhanda, 2007).

Salah satu bentuk transfer ke daerah ini adalah Dana Alokasi Umum yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan yang cukup besar. Menurut Kuncoro (2007) dalam Fhino (2009) PAD hanya mampu membiayai sekitar 20% kebutuhan daerah sehingga tidak sedikit daerah mengalami ketergantungan terhadap DAU ini.

Untuk memenuhi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan strategi yang tepat guna dalam penggunaan anggaran. Salah satu pos belanja yang paling menyentuh kepentingan masyarakat adalah belanja modal. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Suhanda, 2007). Belanja modal ini yang dikeluarkan pemerintah diantaranya adalah untuk pembangunan dan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan transportasi. Kemajuan di sektor-sektor inilah yang nantinya akan memicu perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Salah satu ukuran penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat yang menilai kualitas penduduk dari faktor fisik dan non fisik. IPM menilai kualitas pembangunan manusia berdasarkan tiga indikator yaitu indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penilaian terhadap kualitas ini meliputi tiga dimensi dasar yaitu lamanya hidup, tingkat pengetahuan dan standar hidup yang layak, dimana ketiga dimensi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk meneliti sejauh mana kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan DAU yang diterima untuk kepentingan belanja modal dan sejauh manadampak alokasi belanja modal tersebut terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian replikasi dengan mengambil sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan judul: **"HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI**

# **UMUM (DAU), BELANJA MODAL, DAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT”.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan bahwa masalah utama pada yang menjadi objek penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh besaran dana alokasi umum terhadap jumlah belanja modal yang dianggarkan pemerintah ?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal yang dianggarkan terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kebijakan pemerintah dalam menganggarkan belanja modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan belanja modal terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, khususnya mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal.



2. Bagi pemerintah, memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.
3. Bagi dunia pendidikan, dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan untuk referensi penelitian di masa yang akan datang.

### **1.5. Batasan Penelitian**

1. Batasan aspek dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya meneliti Dana Alokasi Umum dan belanja modal yang dianggarkan saja.
2. Batasan lokal dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menguji Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat saja, sehingga hasil penelitian tidak dapat diberlakukan dalam pengambilan kebijakan di daerah lain.
3. Batasan waktu dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya meliputi tahun 2007-2009 saja.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan digambarkan mengenai isi keseluruhan dari skripsi ini mulai dari bab satu sampai dengan bab lima, yaitu:

- BAB I** : Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan
- BAB II** : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian.
- BAB III** : Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari variabel dan definisinya, populasi, pengumpulan data dan teknik yang digunakan
- BAB IV** : Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang dilakukan. Sehingga akan didapatkan jawaban mengenai permasalahan yang diajukan .
- BAB V** : Bab ini merupakan bab penutup yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran mengenai penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1. Konsep Desentralisasi**

Menurut Indra Bastian (2005) yang mengutip pernyataan Rondinelli (1983), desentralisasi merupakan perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen, dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.

Di dalam azas desentralisasi seiring dengan diserahkannya kewenangan kepada daerah, pemerintah pusat harus menyerahkan pembiayaan, personalia dan pelengkapan (3P). Tanpa penyerahan secara simultan ketiga komponen tersebut maka implementasi dari desentralisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seringkali terjadi mandeknya penyerahan salah satu diantara tiga komponen ini, biasanya pada pembiayaan, dianggap sebagai sumber masalah oleh pemerintah daerah sehingga tujuan dari desentralisasi tidak terlaksana.

Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, Mills (1982) dalam Indra (2005) menyatakan bahwa desentralisasi memiliki tujuan politik yang penting baik secara filosofis maupun ideologis. Alasannya adalah bahwa partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah serta kecermatan pejabat publik dijamin dalam praktik pelayanan kepada masyarakatnya. Dalam tingkatan pragmatis, desentralisasi dianggap sebagai cara untuk mengatasi hambatan kelembagaan, fisik, dan administratif dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sebelum ini hanya merujuk pada perspektif desentralisasi administrasi atau *administrative decentralization perspective*. Perspektif ini mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan (bukan kekuasaan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau *the transfer of authority from central to local government* (Diana, Conyer, 1984 dalam Indra ,2005). Tujuan utama kebijakan desentralisasi difokuskan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

## 1.2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal ini pada hakikatnya ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penerapan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengambilan keputusan secara tersentralisasi menyebabkan kurangnya akuntabilitas, lambatnya pembangunan infrastruktur, menurunnya *rate of return* pada proyek-proyek sektor publik, serta terhambatnya pengembangan institusi di daerah. Hal ini terjadi karena kondisi geografis dan demografis yang menjadi hambatan. Diharapkan melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan sampai tingkat yang paling dekat kepada masyarakat lokal.



Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat juga bersifat *luas, nyata dan bertanggungjawab*. *Luas* berarti kewenangan residu justru berada di pusat (seperti pada Negara federal); *Nyata* berarti kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut kebutuhan untuk bertahan dan berkembang di suatu daerah; dan *Bertanggung jawab* berarti kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan dalam konteks tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Untuk menjaga bentuk Negara kesatuan, Pemerintah Pusat masih memiliki kontrol atas daerah otonom. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar, atau sebaliknya sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud adalah seperti pengawasan ini tidak lagi dilakukan secara structural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap perda memerlukan persetujuan pusat untuk berlaku.

### **1.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Dalam perkembangannya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan yang disebabkan kuatnya tarik-menarik kepentingan di kalangan elit politik pada masa tersebut. Berikut perkembangan aturan mengenai otonomi daerah yang dimuat dalam UU berikut:



1. UU No. 1 Tahun 1945. Undang-undang ini lebih menekankan pada dekosentrasi. Kepala daerah hanyalah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah
2. UU No.2 Tahun 1948. Pada UU ini terdapat dualisme peran dari seorang pemimpin daerah, yaitu berperan besar dalam perkembangan daerah, dan di sisi lain sebagai alat pemerintah pusat
3. UU No. 1 Tahun 1957. Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, dimana kepala daerah masih bertanggung jawab penuh kepada DPRD tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
4. Penetapan presiden No. 6 tahun 1959. Pada masa ini otonomi daerah lebih menekankan pada dekosentrasi. Melalui Penpres ini, kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
5. UU No. 18 Tahun 1965. Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekosentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.
6. UU No. 5 Tahun 1974. Setelah terjadinya peristiwa G.30.S.PKI pada dasarnya terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan sampai dikeluarkannya UU ini. UU ini lebih menekankan pada pembangunan nasional yang menjadi tema umum secara nasional.
7. UU No. 22 Tahun 1999. Undang-undang ini menjadi salah satu produk reformasi dimana UU ini menjadikan pemerintah daerah menjadi titik sentral

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

8. UU No. 32 Tahun 2004. Merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999.
9. UU No. 33 Tahun 2004. Merupakan revisi dari UU No. 25 Tahun 1999.

### **1.2.2. Asas Otonomi Daerah**

Ada beberapa asas penting dalam Undang-undang Otonomi Daerah, antara lain:

1. *Asas desentralisasi*, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Dekosentrasi*, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
3. *Tugas pembantuan*, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
4. *Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*, maksudnya adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan

memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

### **1.2.3. Ruang Lingkup Otonomi Daerah**

#### **1. Pembagian Kewenangan**

Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Kewenangan Daerah**

Kewenangan daerah dapat digolongkan menjadi tiga:

(a) Kewenangan maksimum yaitu seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta kewenangan bidang lain.

(b) Kewenangan minimum , yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

(c) Kewenangan lainnya;



- 1) Mengelola sumber daya nasional dan kelestarian lingkungan di wilayahnya.
- 2) Kewenangan di wilayah laut: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, dan ruang, dan penegakan hukum terhadap peraturan yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- 3) Kepegawaian daerah: kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji tunjangan dan tunjangan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

b. Kewenangan Propinsi

Kewenangan propinsi meliputi:

- (a) Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- (b) Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.
- (c) Kewenangan propinsi sebagai wilayah administratif mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang



dilimpahkan kepada kapada gubernur selaku wakil pemerintah.

(d) Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom secara lebih rinci yang diatur dalam PP No. 25 tahun 2000 yang dikenal dengan 20 kewenangan.

c. Kewenangan pemerintahan (Pusat)

Kewenangan pemerintah pusat dapat digolongkan menjadi:

(a) Kewenangan umum yaitu politik dalam negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal.

(b) Kewenangan lainnya menyangkut kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

## 2. Legislatif

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah berwenang menetapkan berbagai peraturan yang disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda). Beberapa hal penting menyangkut perda

telah diatut dalam UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004.

### **3. Keuangan Daerah**

Masalah yang sangat penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian/perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting, karena itulah dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah difokuskan terhadap masalah tersebut. Beberapa hal penting yang dibahas dalam UU tersebut antara lain:

#### **1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan:**

- a. Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **2) Sumber pendapatan daerah**

- a. Pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang asli.

- b. Dana perimbangan.
- c. Pinjaman daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**3) Persentase dana perimbangan**

**a. Dana perimbangan:**

(1) Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan daerah dari sumber daya alam.

(2) Dana alokasi umum.

(3) Dana alokasi khusus.

- b. Bagian daerah atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, diterima langsung oleh daerah penghasil.
- c. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, diterima daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan pembagian imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.



- e. **Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.**
- f. **10% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.**
- g. **Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.**
- h. **Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut:**
- (1) Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah.**

(2) Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbang 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah.

### **1.3. Dana Alokasi Umum**

Menurut UU No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 porsi Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-sekurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri netto. Sementara itu, proporsi pembagian DAU adalah bagian 10% untuk Provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota.

#### **1.3.1. Variabel DAU**

- a. Variabel Alokasi Dasar adalah belanja pegawai yang dicerminkan oleh jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- b. Variabel kebutuhan fiskal terdiri jumlah penduduk, luas wilayah darat dan perairan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks

Kemahalan Konstruksi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (sesuai Undang-undang No. 33 Tahun 2004).

- c. Variabel kapasitas fiskal yang merupakan pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DBH Pajak dan DBH SDA.

### **1.3.2. Formulasi DAU dalam Kerangka Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004**

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, kebijakan dalam pengalokasian DAU sebagai berikut:

- a. DAU yang ditetapkan 26% Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi DAU per daerah sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 dan PP Nomor 55 tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden.
- b. Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10% untuk daerah provinsi dan sebesar 90% untuk daerah kabupaten/kota dari besaran secara nasional.
- c. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU, yaitu dihitung berdasarkan atas dasar celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD). Celah fiskal suatu merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (KpF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF), sedangkan AD dihitung berdasarkan Jumlah Gaji PNSD.

### 1.3.3. Bentuk Umum Formula DAU

Bentuk umum formulasi alokasi DAU kepada masing-masing daerah secara formula dapat ditunjukkan pada persamaan berikut ini:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Dimana :

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Dimana :

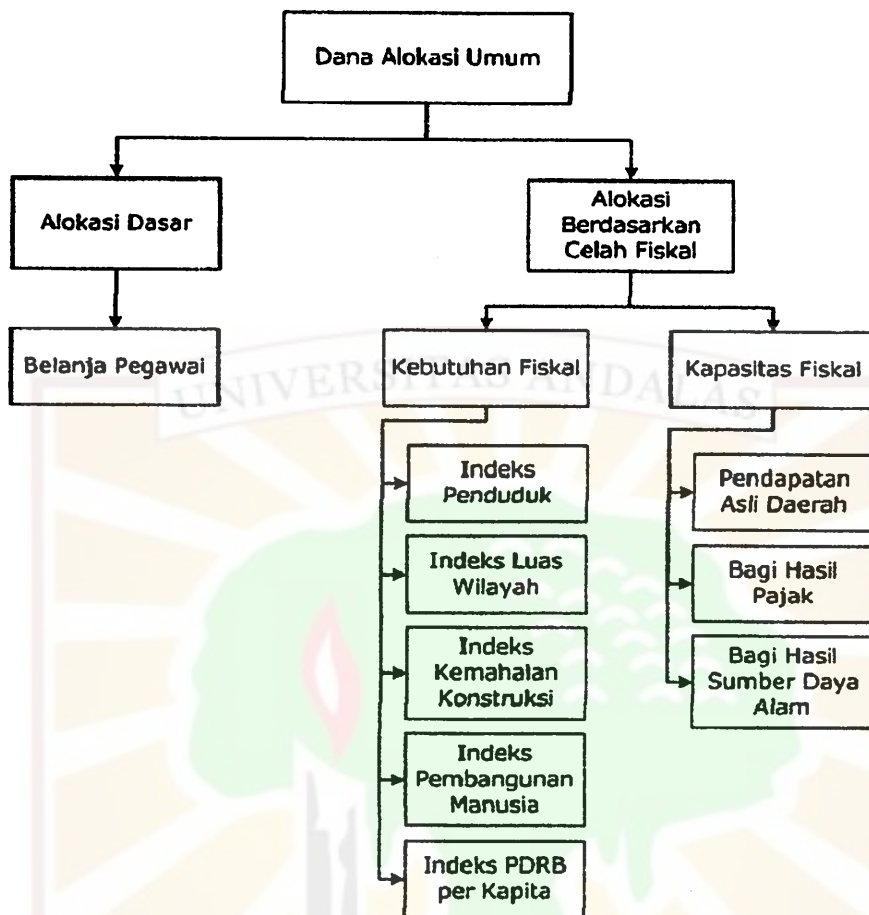
$\text{CF} = \text{KbF} - \text{KpF}$  (celah fiskal merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal)

- Celah fiskal (CF) merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF), atau dapat dirumuskan dengan:

$$\text{CF} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

Secara umum komponen yang menjadi dasar perhitungan DAU dijelaskan dalam tabel berikut:





#### 1.4. Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam pemerintahan. Belanja modal ini berbeda dengan belanja barang. Menurut PMK No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS)

belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja barang digunakan untuk pembelian barang yang habis pakai, sedangkan belanja modal digunakan untuk perolehan barang yang memiliki masa guna lebih dari 12 bulan. Belanja modal meliputi antara lain untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan No. PER 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan AKUN Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Sesuai dengan BAS, suatu belanja dikategorikan sebagai BM apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Pengeluaran terhadap aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

### **1.5. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh Program Pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

IPM dianggap sebagai pengukur kesejahteraan yang komprehensif dimana tidak hanya pendapatan per kapita yang dijadikan patokan tetapi juga aspek lain yang menyangkut pembangunan manusia. Secara umum IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita *gross domestic product*/produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli *purchasing power parity* dalam Dollar AS.

Sehingga secara umum Indeks Pembangunan manusia dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{HDI} = 1/3 (\text{indeks harapan hidup}) + 1/3 (\text{indeks pendidikan}) + 1/3 (\text{indeks PDB})$$

### 1.5.1. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia

#### a. Usia hidup

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

#### b. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan 2 indikator yaitu rata-rata lama sekolah (*mean year schooling*) dan angka melek huruf. Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia



15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung kemudian diberi bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga. Untuk penghitungan indeks, batas maksimum untuk angka melek huruf dipakai 100 dan minimum 0 (nol), yang menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis dan nilai 0 mencerminkan sebaliknya.

c. Standar Hidup Layak

Angka standard hidup layak bisa menggunakan indikator GDP perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) atau menggunakan indikator rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (*adjusted real per capita expenditure*). Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 -100,0 dengan kategori sebagai berikut:

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,00
2. Menengah atas : IPM antara 66,00 s/d 79,99
3. Menengah bawah : IPM antara 50,00 s/d 65,99
4. Rendah : IPM kurang dari 50,00

## **1.6. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

**Abdullah & Halim (2003)** yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah se Jawa Dan Bali menyatakan bahwa terdapat bukti empiris dimana dalam jangka panjang dana transfer, dalam hal ini adalah DAU, secara jangka panjang mempengaruhi belanja modal dan pengurangan transfer dapat menyebabkan penurunan dalam belanja modal.

**Hariyanto dan Adi (2007)** melakukan penelitian mengenai Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan per Kapita di Jawa dan Bali juga menyatakan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, kontribusi DAU terhadap belanja modal masih belum efektif karena pembangunan kurang merata yang ditunjukkan masih banyaknya desa-desa terbelakang di Jawa dan Bali.

**Abdillah (2010)** juga menyatakan dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kepulauan Riau bahwa belanja daerah (di dalamnya termasuk belanja modal) sangat dipengaruhi oleh DAU meskipun alokasi DAU tersebut menurun.

**Christy (2009)** melakukan penelitian dengan Judul Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Christy meneliti tahun 2004 sampai 2006 pada Kabupaten/Kota

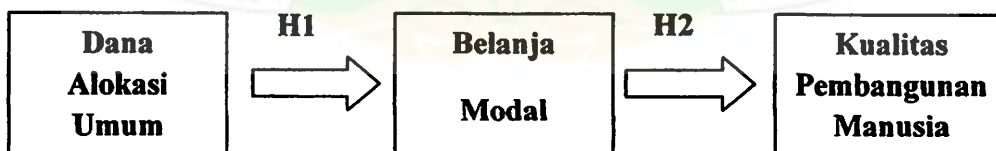
se- Jawa Tengah. Hasil regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi yang sangat kecil (0,000) berkaitan dengan pengaruh belanja modal terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini relatif tepat untuk memprediksi besarnya IPM. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia dapat diterima (terbukti). Nilai *adjusted R square* model regresi ini cukup besar, yaitu 0,435 atau 43,6%. Hal ini berarti IPM dapat dijelaskan oleh belanja modal sebesar 43,6%, selebihnya dijelaskan oleh faktor/variabel lainnya.

Berdasarkan konsep-konsep diatas untuk melakukan penelitian mengenai hubungan Dana Alokasi Umum (DAU), belanja modal dan kualitas pembangunan manusia, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**H1** = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

**H2** = Belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia

Dari uraian di atas dapat dibuat model penelitian sebagai berikut:



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan desain kausal. Penelitian kausal berusaha mengamati alasan atau penyebab terjadinya suatu fenomena yang diteliti. Dapat diartikan bahwa desain kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel X dengan variabel Y dimana variabel dependen (variabel Y) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (variabel X) sehingga nanti dapat dilihat bahwa variabel X menyebabkan/mempengaruhi variabel Y. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia.

#### 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk melakukan penelitian (Kuncoro,2003). Populasi dalam penelitian ini menggunakan *data pooling*, yaitu kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*). Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota.

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari suatu populasi yang mencerminkan karakteristik populasi tersebut (Kuncoro,2003). Dalam penelitian ini sampel diambil dengan teknik non probabilistik dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel



diambil dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah semua Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2007 sampai 2009.

### **3.3. Definisi Variabel dan Pengukurannya**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Dana Alokasi Umum**

Menurut UU No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Angka Dana Alokasi Umum ini didapatkan dari data APBD selama periode 2007-2009

#### **2. Belanja Modal**

Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam pemerintahan. Angka belanja modal ini didapatkan dari data APBD selama periode 2007-2009

#### **3. Kualitas pembangunan manusia**

Pada penelitian ini kualitas pembangunan manusia diukur dengan menggunakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini dipilih

karena pengukuran kesejahteraan yang terdapat pada IPM tidak hanya dari segi ekonomi saja tetapi juga melihat dari sisi kesehatan dan pendidikan

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data laporan realisasi APBD pemda Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Data yang diambil adalah angka Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Data ini didapatkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat dan Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Data selanjutnya yaitu data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Data ini diperoleh dari perpustakaan Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.

### 3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis statistik inferensia model analisis regresi sederhana (*simple regression*). Hubungan masing-masing variabel dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Regresi} = \boxed{Y = a + bx}$$

Sehingga hipotesis dapat diformulasikan sebagai berikut:

#### 1. Hipotesis 1

$$BM = a + b (\text{DAU})$$

Alokasi belanja modal ditentukan oleh besarnya alokasi dari dana alokasi umum.

## 2. Hipotesis 2

$$IPM = a + b (BM)$$

Besarnya Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh besarnya alokasi belanja modal.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis akan dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan hanya uji normalitas karena penelitian ini hanya menggunakan model regresi sederhana sehingga uji asumsi klasik lainnya tidak digunakan.

Uji normalitas menurut Ghozali (2007) bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu:

### a. Analisis Grafik

Merupakan cara melihat normalitas distribusi dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal tersebut. Jika data berdistribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis statistik

Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan nilai *Z-skewness*. Uji statistik lain yang digunakan dalam menguji normalitas residual adalah uji statistik non parameterik *Kolmogorov Smirnov (K-S)*.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1. Deskripsi Data**

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009 dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2007-2009 untuk tiga tahun pengamatan.

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota, antara lain:

1. Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kabupaten Solok
4. Kabupaten Sijunjung
5. Kabupaten Tanah Datar
6. Kabupaten Padang Pariaman
7. Kabupaten Agam
8. Kabupaten 50 Kota
9. Kabupaten Pasaman
10. Kabupaten Solok Selatan
11. Kabupaten Dharmasraya
12. Kabupaten Pasaman Barat
13. Kota Padang
14. Kota Solok
15. Kota Sawahlunto
16. Kota Padang Panjang
17. Kota Bukittinggi



18. Kota Payakumbuh

19. Kota Pariaman

Dana alokasi umum yang diterima oleh 19 Kabupaten/Kota tersebut kemudian dialokasikan lagi ke berbagai pos belanja masing-masing Pemda. Berikut adalah perbandingan dana alokasi umum terhadap belanja modal masing-masing Kabupaten/Kota:

Tabel 4-1 Persentase Belanja Modal terhadap Dana Alokasi Umum

**PERSENTASE DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2007**

	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal	% Belanja Modal terhadap DAU
1	Kota Padang	Rp 565.100.000.000,00	Rp 123.514.896.510,00	22%
2	Kota Padang Panjang	Rp 170.405.462.000,00	Rp 60.527.401.000,00	36%
3	Kota Solok	Rp 182.247.000.000,00	Rp 74.507.148.000,00	41%
4	Kota Pariaman	Rp 195.587.797.200,00	Rp 107.653.690.450,00	55%
5	Kota Payakumbuh	Rp 205.435.000.000,00	Rp 48.712.635.040,00	24%
5	Kota Bukittinggi	Rp 211.433.000.000,00	Rp 87.745.222.614,00	42%
7	Kota Sawahlunto	Rp 168.418.962.000,00	Rp 60.396.104.000,00	36%
3	Kabupaten Mentawai	Rp 236.058.000.000,00	Rp 121.562.193.735,75	51%
9	Kabupaten Solok Selatan	Rp 188.488.000.000,00	Rp 113.907.262.300,00	60%
0	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp 344.547.000.000,00	Rp 129.666.098.000,00	38%
	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 355.818.875.000,00	Rp 99.714.102.000,00	28%
2	Kabupaten Pasaman	Rp 263.891.000.000,00	Rp 107.717.774.648,00	41%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 380.657.000.000,00	Rp 142.136.485.000,00	37%
1	Kabupaten Dharmasraya	Rp 219.740.237.000,00	Rp 111.691.176.000,00	51%
5	Kabupaten Solok	Rp 325.791.000.000,00	Rp 110.939.977.514,00	34%
5	Kabupaten Sijunjung	Rp 243.480.000.000,00	Rp 80.963.472.613,00	33%
7	Kabupaten Tanah Datar	Rp 337.755.457.000,00	Rp 112.242.104.000,00	33%
8	Kabupaten Agam	Rp 337.132.000.000,00	Rp 105.801.476.766,00	31%
0	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 271.069.000.000,00	Rp 141.071.319.351,00	52%

**PERSENTASE DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2008**

	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal	% Belanja Modal terhadap DAU
1	Kota Padang	Rp 624.642.086.000	Rp 120.335.197.000	19%
2	Kota Padang Panjang	Rp 192.699.288.000	Rp 72.802.906.000	38%
3	Kota Solok	Rp 205.820.702.000	Rp 87.216.922.000	42%
4	Kota Pariaman	Rp 223.192.120.000	Rp 89.889.708.000	40%
5	Kota Payakumbuh	Rp 234.690.661.000	Rp 63.304.129.000	27%
6	Kota Bukittinggi	Rp 236.403.814.000	Rp 71.460.846.000	30%
7	Kota Sawahlunto	Rp 187.631.256.000	Rp 68.470.719.000	36%
8	Kabupaten Mentawai	Rp 273.300.163.000	Rp 78.754.392.000	29%
9	Kabupaten Solok Selatan	Rp 213.109.220.000	Rp 112.464.654.000	53%
0	Kabupaten Lima puluh kota	Rp 385.019.190.000	Rp 177.130.574.000	46%
1	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 407.306.624.000	Rp 123.258.566.000	30%
2	Kabupaten Pasaman	Rp 297.522.370.000	Rp 95.439.821.000	32%
3	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 424.760.863.000	Rp 151.390.391.000	36%
4	Kabupaten Dharmasraya	Rp 247.801.019.000	Rp 148.477.068.000	60%
5	Kabupaten Solok	Rp 365.383.071.000	Rp 96.426.151.000	26%
6	Kabupaten Sijunjung	Rp 273.785.923.000	Rp 95.224.245.000	35%
7	Kabupaten Tanah Datar	Rp 373.848.936.000	Rp 138.336.794.000	37%
8	Kabupaten Agam	Rp 414.880.748.000	Rp 110.814.070.000	27%
9	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 305.576.076.000	Rp 114.459.614.000	37%

**PERSENTASE DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2009**

	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal	% Belanja Modal terhadap DAU
	Kota Padang	Rp 628.472.618.000	Rp 112.340.814.426	18%
	Kota Padang Panjang	Rp 194.871.640.000	Rp 77.873.545.451	40%
	Kota Solok	Rp 276.657.020.000	Rp 175.872.341.510	64%
	Kota Pariaman	Rp 222.479.190.000	Rp 107.858.258.357	48%
	Kota Payakumbuh	Rp 237.492.500.000	Rp 70.000.355.846	29%
	Kota Bukittinggi	Rp 236.106.157.000	Rp 84.406.144.950	36%
	Kota Sawahlunto	Rp 193.025.971.000	Rp 49.925.881.725	26%

Kabupaten Mentawai	Rp	276.657.020.000	Rp	175.872.341.510	64%
Kabupaten Solok Selatan	Rp	236.279.210.000	Rp	137.876.967.944	58%
Kabupaten Lima puluh kota	Rp	391.553.317.000	Rp	83.714.531.267	21%
Kabupaten Padang Pariaman	Rp	417.431.660.000	Rp	115.642.023.323	28%
Kabupaten Pasaman	Rp	318.690.010.000	Rp	76.003.029.393	24%
Kabupaten Pesisir Selatan	Rp	456.755.040.000	Rp	98.900.244.624	22%
Kabupaten Dharmasraya	Rp	246.601.360.000	Rp	205.874.761.272	83%
Kabupaten Solok	Rp	368.844.815.000	Rp	53.781.922.194	15%
Kabupaten Sijunjung	Rp	279.405.725.000	Rp	155.846.711.987	56%
Kabupaten Tanah Datar	Rp	379.889.210.000	Rp	85.597.958.760	23%
Kabupaten Agam	Rp	418.752.290.000	Rp	49.925.881.725	12%
Kabupaten Pasaman Barat	Rp	323.130.530.000	Rp	142.295.132.569	44%

Dari tabel diatas dapat diambil rata-rata tahun 2007, persentase belanja modal dibandingkan dengan DAU adalah 39,21 % , pada tahun 2008 turun menjadi 35,85% dan naik kembali pada tahun 2009 menjadi 37,86%. Secara umum pergerakan angka persentase belanja modal ini jika dibandingkan dengan DAU memang fluktuatif, berbeda dengan angka IPM yang mengalami tren naik setiap tahunnya. Namun jika dilihat lebih lanjut jumlah alokasi belanja modal mengalami tren kenaikan. Sehingga hasil ini dapat mendukung hasil penelitian Christy (2009) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia.

## 1.2. Deskriptif Statistik Data Penelitian

Berdasarkan data *cross section* sebanyak 12 Kabupaten dan 7 Kota dengan *time series* sebanyak tiga tahun pengamatan maka diperoleh deskriptif statistik penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4-2**  
**Deskriptif Statistik**

		Descriptive Statistics		
		Dana Alokasi Umum	Belanja Modal	Indeks Pembangunan Manusia
<b>N</b>	Valid	57	57	57
	Missing	0	0	0
<b>Mean</b>		294313426970.9474	118044328198.3005	72.1863
<b>Median</b>		273785923000.0000	116091511570.2400	72.0800
<b>Std. Deviation</b>		119957020920.72614	37039649733.13464	3.09171
<b>Minimum</b>		263891000.00	49925881725.00	67.48
<b>Maximum</b>		628472618000.00	205874761272.00	77.86

Sumber: data diolah

Tabel 4-1 di atas menjelaskan mengenai sampel yang diambil dalam penelitian ini. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dari pusat rata-rata berjumlah Rp 294.313.426.970,95 dengan standar deviasi Rp 119.957.020.920,73. Alokasi DAU yang paling besar diterima oleh Kota Padang pada tahun 2009 sebesar Rp 628.472.618.000.

Sementara untuk belanja modal dari tabel 4-1 terlihat bahwa rata-rata belanja modal yang dianggarkan adalah sebesar Rp 118.044.328.198,30 dengan standar deviasi Rp 37.039.649.733,13. Alokasi belanja modal terbesar diperoleh oleh Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2009. Nilai deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan realisasi belanja modal yang tinggi.

Kemudian untuk angka Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan tabel 4-1 rata-rata IPM adalah 72,19 dengan standar deviasi 3,09. Untuk IPM tertinggi adalah kota



Bukittinggi dengan pencapaian 77,46. Selama 3 tahun terakhir Kota Bukittinggi selalu menjadi daerah yang pencapaian IPM-nya paling tinggi.

### 1.3. Uji Normalitas

Model regresi pada penelitian ini digunakan untuk peramalan. Sebuah model regresi dapat dikatakan model yang baik jika kesalahan dalam peramalannya minimum. Untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan model regresi, haruslah dilakukan uji asumsi klasik pada model tersebut. Karena dalam penelitian ini mengambil model penelitian regresi sederhana dengan satu variabel Y dan satu variabel X sehingga hanya ada satu uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas data.

Dalam uji normalitas ini dibuktikan bahwa variabel pengganggu pada model regresi terdistribusi normal. Uji statistik untuk menguji normalitas residua pada penelitian ini menggunakan uji statisti non parameterik *Kolmogorov-Smirnov* (1 sample K-S tes. Kriteria pengambilan keputusan jika nilai *asympt.Sig* > 0,05 maka data terdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai *asympt.Sig* < 0,05 maka data residual tidak terdistribusi normal.

**Tabel 4-3**  
**Uji Normalitas**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Alokasi Umum	.111	57	.078	.938	57	.006
Belanja Modal	.057	57	.200*	.986	57	.732
Indeks Pembangunan Manusia	.114	57	.064	.946	57	.012

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.



Sumber: data diolah

Dari hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai signifikansinya DAU 0,078; belanja modal 0,200; dan IPM 0,064 dimana masing-masing data tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### 1.4. Analisa Regresi Sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil penelitian ini dapat ditentukan besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat yang diperlihatkan oleh persamaan regresi berikut:

**Tabel 4-4**  
**Analisis hasil regresi 1**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.281 <sup>a</sup>	.079	.062	3.58645

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	92471542720.037	12681906947.711		7.292	.000
Dana Alokasi Umum	.087	.040	.281	2.175	.034

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari analisis menggunakan regresi sederhana ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034 untuk t sebesar 2,18. Nilai signifikansi yang kecil dari 0,05 ini juga menunjukkan bahwa variabel DAU dapat digunakan dalam memprediksi Belanja Modal.

Nilai adjusted R<sup>2</sup> adalah sebesar 0,062, hal ini berarti bahwa 6,2% belanja modal dapat dijelaskan oleh DAU dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini sesuai dengan penelitian Fhino (2009) dan David (2007) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap besaran belanja modal. Nilai signifikansi yang kecil juga menunjukkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja modal dipengaruhi oleh besaran Dana Alokasi Umum yang diperoleh daerah bersangkutan. Hal ini konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003) yang menunjukkan belanja daerah lebih banyak ditentukan oleh DAU daripada PAD.

Tabel 4-4

#### Analisis hasil regresi 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 <sup>a</sup>	.198	.183	33476056390.1305

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 <sup>a</sup>	.198	.183	33476056390.13056

a. Predictors: (Constant), Indeks Pembangunan Manusia

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	502619843546	104541162511		4.808	.000
		.165	.860			
	Indeks Pembangunan Manusia	-5327540422.889	1446909803.933	-.445	-3.682	.001

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari hasil regresi sederhana ini diperoleh signifikansi yang sangat kecil yaitu 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini relatif tepat dalam memprediksi besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Nilai adjusted R square sebesar 0,182 atau 18,2 %. Hal ini berarti IPM dapat dijelaskan oleh belanja modal sebesar 18,2% dan selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

## 1.5. Pembahasan Hasil

### 1.5.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4-2 didapatkan t hitung sebesar 2,175 dengan signifikansi 0,034. Jika dibandingkan dengan t-tabel dengan derajat bebas (df) =  $n-k-1 = 57-1-1 = 55$  dimana  $n$  = jumlah sampel, dan  $k$  =

jumlah variabel independen, maka nilai t-tabel dengan derajat kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah sebesar 1,67 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,175 > 1,67$ ) dengan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,034 < 0,050$ ), maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah di Sumatera Barat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Hal ini konsisten dengan penelitian Fhino (2009), Prakoso (2004) serta Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Serta nilai signifikansi yang kecil mengindikasikan bahwa dalam penganggaran belanja modal pemerintah daerah sangat bergantung kepada Dana Alokasi Umum dari pusat.

Sehingga dengan ini dapat dinyatakan bahwa H1: Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dapat diterima.

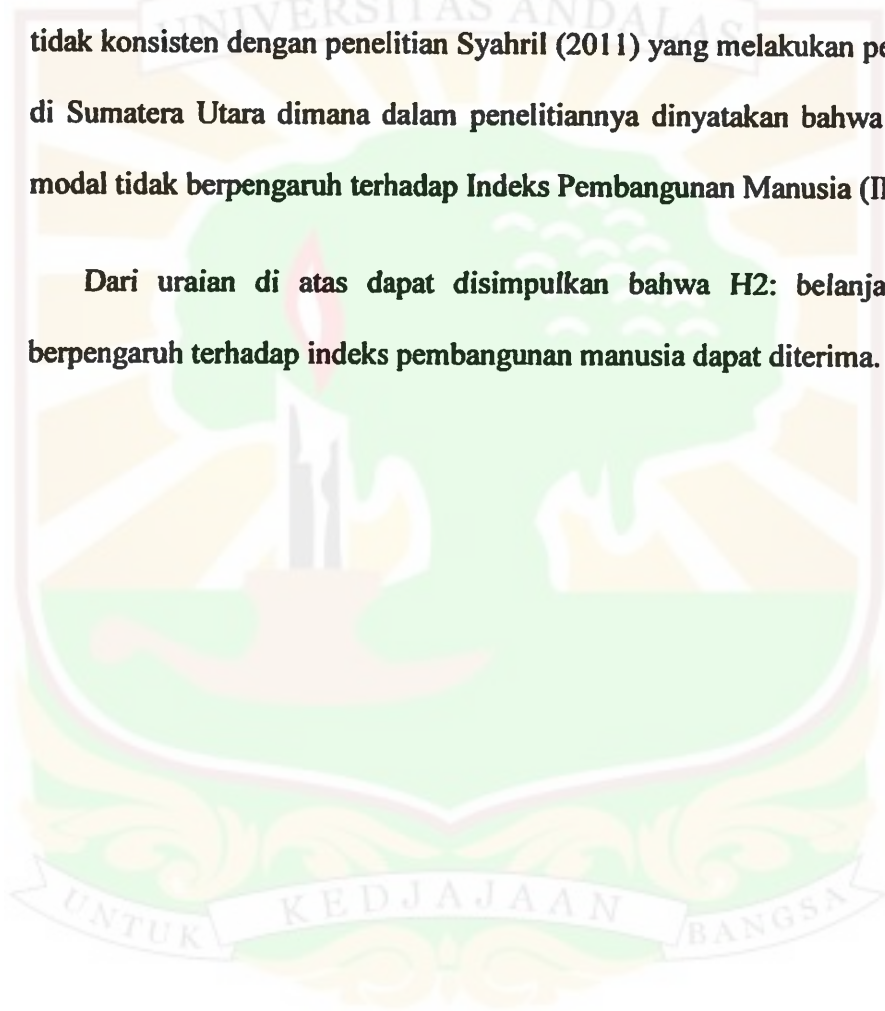
### **1.5.2. Belanja Modal berpengaruh terhadap Kualitas Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4-3 didapatkan  $t_{hitung}$  sebesar 3,682 dengan signifikansi 0,001. Jika dibandingkan dengan t-tabel dengan derajat bebas ( $df$ ) =  $n - k - 1 = 57 - 1 - 1 = 55$  dimana  $n$  = jumlah sampel, dan  $k$  = jumlah variabel independen, maka nilai t-tabel dengan derajat kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah sebesar 1,67 maka  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  ( $-3,682 > -1,67$ ) dengan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,001 < 0,050$ ), maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah belanja modal yang

dianggarkan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya Indeks Pembangunan Manusia.

Nilai adjusted R square sebesar 0,183 atau 18,3 % menunjukkan bahwa besarnya IPM dapat ditunjukkan oleh belanja modal sebesar 18,3 %. Hal ini sesuai dengan penelitian Fhino (2009) yang menyimpulkan bahwa IPM secara signifikan dipengaruhi oleh besaran belanja modal. Namun, hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Syahril (2011) yang melakukan penelitian di Sumatera Utara dimana dalam penelitiannya dinyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa H2: belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dapat diterima.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisis data , uji hipotesis serta pembahasan penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya belanja modal Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat khususnya dalam bidang finansial. Untuk ke depannya diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi daerahnya sehingga mampu menganggarkan belanja yang lebih besar untuk kesejahteraan rakyatnya.
2. Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia yang dalam penelitian ini menggunakan ukuran Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah telah tepat guna. Namun, dibutuhkan lagi penganggaran yang tepat sehingga belanja modal ini mampu menjadi

- Kementerian Keuangan. 2011. *Buku Pelengkap Buku Pegangan 2011*
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga
- \_\_\_\_\_.2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana menulis tesis?*. Penerbit Erlangga. Surabaya
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang *Pedoman Penggunaan AKUN Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Sesuai dengan BAS*
- Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- \_\_\_\_\_. No. 59 tahun 2007 tentang *Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah*
- PMK No. 91/PMK.06/2007 tentang *Bagan Akun Standar (BAS)*
- PP No 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- \_\_\_\_\_. No 39 tahun 2007 tentang *Pengelolaan Uang Negara/Daerah*
- \_\_\_\_\_. No 55 tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118
- Syahril. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Bintang

UNDP. 2004. *Human Development Report*. National Development Programme. New York

UU No 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

\_\_ No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*



LAMPIRAN 1

**DAFTAR DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2007**

No	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
1	Kota Padang	Rp 565.100.000.000,00	Rp 139.376.404.404,00
2	Kota Padang Panjang	Rp 169.805.000.000,00	Rp 75.610.065.000,00
3	Kota Solok	Rp 182.247.000.000,00	Rp 96.036.889.536,00
4	Kota Pariaman	Rp 194.522.000.000,00	Rp 114.115.081.740,00
5	Kota Payakumbuh	Rp 205.435.000.000,00	Rp 65.033.949.601,00
6	Kota Bukittinggi	Rp 211.433.000.000,00	Rp 99.325.033.392,00
7	Kota Sawahlunto	Rp 167.833.000.000,00	Rp 66.888.631.393,00
8	Kabupaten Mentawai	Rp 236.058.000.000,00	Rp 121.562.193.735,75
9	Kabupaten Solok Selatan	Rp 188.488.000.000,00	Rp 119.330.115.188,00
10	Kabupaten Lima puluh kota	Rp 344.547.000.000,00	Rp 163.612.016.427,00
11	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 352.452.000.000,00	Rp 117.490.453.642,00
12	Kabupaten Pasaman	Rp 263.891.000,00	Rp 115.094.610.700,00
13	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 380.657.000.000,00	Rp 141.964.844.480,00
14	Kabupaten Dharmasraya	Rp 218.596.000.000,00	Rp 134.441.801.226,00
15	Kabupaten Solok	Rp 325.791.000.000,00	Rp 122.418.075.999,86
16	Kabupaten Sijunjung	Rp 243.480.000.000,00	Rp 110.074.075.530,00
17	Kabupaten Tanah Datar	Rp 334.472.000.000,00	Rp 132.402.833.042,00
18	Kabupaten Agam	Rp 377.130.000.000,00	Rp 124.759.971.286,70
19	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 271.069.000.000,00	Rp 139.955.075.580,00

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

## LAMPIRAN 2

**DAFTAR DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2008**

No.	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
1	Kota Padang	Rp 626.839.946.344,00	Rp 165.338.472.120,00
2	Kota Padang Panjang	Rp 193.365.806.000,00	Rp 90.456.559.000,00
3	Kota Solok	Rp 205.820.702.000,00	Rp 105.415.067.282,41
4	Kota Pariaman	Rp 223.192.120.000,00	Rp 116.091.511.570,24
5	Kota Payakumbuh	Rp 234.690.661.000,00	Rp 81.931.628.825,00
6	Kota Bukittinggi	Rp 236.403.814.000,00	Rp 92.257.454.330,00
7	Kota Sawahlunto	Rp 1.332.700.000,00	Rp 73.570.513.030,01
8	Kabupaten Mentawai	Rp 272.834.439.000,00	Rp 120.775.345.133,00
9	Kabupaten Solok Selatan	Rp 213.109.220.000,00	Rp 133.489.359.855,00
10	Kabupaten Lima puluh kota	Rp 385.019.190.000,00	Rp 196.089.153.875,00
11	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 407.306.624.000,00	Rp 145.446.627.031,00
12	Kabupaten Pasaman	Rp 297.522.370.000,00	Rp 105.832.531.900,00
13	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 424.760.863.000,00	Rp 166.401.888.906,00
14	Kabupaten Dharmasraya	Rp 247.717.954.000,00	Rp 170.968.686.318,06
15	Kabupaten Solok	Rp 365.383.071.000,00	Rp 101.077.496.887,00
16	Kabupaten Swi/Sijunjung	Rp 273.785.923.000,00	Rp 158.670.887.769,03
17	Kabupaten Tanah Datar	Rp 373.848.936.000,00	Rp 157.076.767.240,00
18	Kabupaten Agam	Rp 414.880.748.000,00	Rp 159.026.374.638,00
19	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 305.576.076.000,00	Rp 129.509.410.858,00

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat



## LAMPIRAN 4

### Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2009

No	Kabupaten/ Kota	IPM			Rangking IPM di Sumbar		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	67,72	67,97	68,42	17	19	19
2	Kabupaten Pesisir Selatan	69,52	70,07	70,61	13	13	13
3	Kabupaten Solok	69,29	69,81	70,41	14	14	14
4	Kabupaten Sijunjung	69,26	69,77	70,37	15	15	15
5	Kabupaten Tanah Datar	72,44	72,98	73,54	8	8	8
6	Kabupaten Padang Pariaman	70,09	70,63	71,15	11	11	11
7	Kabupaten Agam	72,08	72,5	72,9	9	9	9
8	Kabupaten 50 Kota	69,52	70,47	70,8	12	12	12
9	Kabupaten Pasaman	71,05	71,71	72,32	10	10	10
10	Kabupaten Solok Selatan	67,54	68,06	68,67	18	17	17
11	Kabupaten Dharmasraya	67,48	67,99	68,6	19	18	18
12	Kabupaten Pasaman Barat	68,84	69,33	69,87	16	16	16
13	Kota Padang	76,7	77,2	77,43	2	2	2
14	Kota Solok	74,28	74,73	75,23	5	5	5
15	Kota Sawahlunto	73,74	74,29	74,71	6	6	6
16	Kota Padang Panjang	76,39	76,93	77,16	3	3	3
17	Kota Bukittinggi	77,13	77,59	77,86	1	1	1
18	Kota Payakumbuh	74,36	74,95	75,37	4	4	4
19	Kota Pariaman	72,82	72,96	73,44	7	7	7
	Sumatera Barat	72,33	72,96	73,44			

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

**LAMPIRAN 5**  
**HASIL UJI STATISTIK**

**A. STATISTIK DESKRIPTIF**

		Statistics		
		Dana Alokasi Umum	Belanja Modal	Indeks Pembangunan Manusia
N	Valid	57	57	57
	Missing	0	0	0
Mean		294313426970.9474	118044328198.3005	72.1863
Median		273785923000.0000	116091511570.2400	72.0800
Std. Deviation		119957020920.72614	37039649733.13464	3.09171
Minimum		263891000.00	49925881725.00	67.48
Maximum		628472618000.00	205874761272.00	77.86

**B. HASIL UJI NORMALITAS**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Alokasi Umum	.111	57	.078	.938	57	.006
Belanja Modal	.057	57	.200*	.986	57	.732
Indeks Pembangunan Manusia	.114	57	.064	.946	57	.012

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

### C. ANALISIS REGRESI SEDERHANA

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.281 <sup>a</sup>	.079	.062	3.58645E10

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.084E21	1	6.084E21	4.730	.034 <sup>a</sup>
	Residual	7.074E22	55	1.286E21		
	Total	7.683E22	56			

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	92471542720.037	12681906947.711		7.292	.000
	Dana Alokasi Umum	.087	.040	.281	2.175	.034

a. Dependent Variable: Belanja Modal

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 <sup>a</sup>	.198	.183	33476056390.13056

a. Predictors: (Constant), Indeks Pembangunan Manusia

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.519E22	1	1.519E22	13.557	.001 <sup>a</sup>
	Residual	6.164E22	55	1.121E21		
	Total	7.683E22	56			

a. Predictors: (Constant), Indeks Pembangunan Manusia

b. Dependent Variable: Belanja Modal

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	502619843546.165	104541162511.860		4.808	.000
	Indeks Pembangunan Manusia	-5327540422.889	1446909803.933	-.445	-3.682	.001

a. Dependent Variable: Belanja Modal

**LAMPIRAN 6**  
**DAFTAR DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL**  
**KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2007**

No	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal	% Belanja Modal terhadap DAU
1	Kota Padang	Rp 565.100.000.000,00	Rp 123.514.896.510,00	22%
2	Kota Padang Panjang	Rp 170.405.462.000,00	Rp 60.527.401.000,00	36%
3	Kota Solok	Rp 182.247.000.000,00	Rp 74.507.148.000,00	41%
4	Kota Pariaman	Rp 195.587.797.200,00	Rp 107.653.690.450,00	55%
5	Kota Payakumbuh	Rp 205.435.000.000,00	Rp 48.712.635.040,00	24%
6	Kota Bukittinggi	Rp 211.433.000.000,00	Rp 87.745.222.614,00	42%
7	Kota Sawahlunto	Rp 168.418.962.000,00	Rp 60.396.104.000,00	36%
8	Kabupaten Mentawai	Rp 236.058.000.000,00	Rp 121.562.193.735,75	51%
9	Kabupaten Solok Selatan	Rp 188.488.000.000,00	Rp 113.907.262.300,00	60%
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp 344.547.000.000,00	Rp 129.666.098.000,00	38%
11	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 355.818.875.000,00	Rp 99.714.102.000,00	28%
12	Kabupaten Pasaman	Rp 263.891.000.000,00	Rp 107.717.774.648,00	41%
13	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 380.657.000.000,00	Rp 142.136.485.000,00	37%
14	Kabupaten Dharmasraya	Rp 219.740.237.000,00	Rp 111.691.176.000,00	51%
15	Kabupaten Solok	Rp 325.791.000.000,00	Rp 110.939.977.514,00	34%
16	Kabupaten Sijunjung	Rp 243.480.000.000,00	Rp 80.963.472.613,00	33%
17	Kabupaten Tanah Datar	Rp 337.755.457.000,00	Rp 112.242.104.000,00	33%
18	Kabupaten Agam	Rp 337.132.000.000,00	Rp 105.801.476.766,00	31%
19	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 271.069.000.000,00	Rp 141.071.319.351,00	52%

Sumber : Data Diolah





**DAFTAR DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2008**

No	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal	% Belanja Modal terhadap DAU
1	Kota Padang	Rp 624.642.086.000	Rp 120.335.197.000	19%
2	Kota Padang Panjang	Rp 192.699.288.000	Rp 72.802.906.000	38%
3	Kota Solok	Rp 205.820.702.000	Rp 87.216.922.000	42%
4	Kota Pariaman	Rp 223.192.120.000	Rp 89.889.708.000	40%
5	Kota Payakumbuh	Rp 234.690.661.000	Rp 63.304.129.000	27%
6	Kota Bukittinggi	Rp 236.403.814.000	Rp 71.460.846.000	30%
7	Kota Sawahlunto	Rp 187.631.256.000	Rp 68.470.719.000	36%
8	Kabupaten Mentawai	Rp 273.300.163.000	Rp 78.754.392.000	29%
9	Kabupaten Solok Selatan	Rp 213.109.220.000	Rp 112.464.654.000	53%
10	Kabupaten Lima puluh kota	Rp 385.019.190.000	Rp 177.130.574.000	46%
11	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 407.306.624.000	Rp 123.258.566.000	30%
12	Kabupaten Pasaman	Rp 297.522.370.000	Rp 95.439.821.000	32%
13	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 424.760.863.000	Rp 151.390.391.000	36%
14	Kabupaten Dharmasraya	Rp 247.801.019.000	Rp 148.477.068.000	60%
15	Kabupaten Solok	Rp 365.383.071.000	Rp 96.426.151.000	26%
16	Kabupaten Sijunjung	Rp 273.785.923.000	Rp 95.224.245.000	35%
17	Kabupaten Tanah Datar	Rp 373.848.936.000	Rp 138.336.794.000	37%
18	Kabupaten Agam	Rp 414.880.748.000	Rp 110.814.070.000	27%
19	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 305.576.076.000	Rp 114.459.614.000	37%

Sumber : Data Diolah

